

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah disajikan dalam bab empat, peneliti menyimpulkan hasil penelitian untuk tiap rumusan masalah sebagai berikut:

1. Terdapat hubungan kausalitas antara pemekaran daerah dan alokasi DAU kabupaten/kota di Indonesia. Hubungan kausalitas tersebut hanya bersifat satu arah (*oneway causality*) yaitu adanya alokasi DAU untuk DOB yang telah dihitung mandiri mempengaruhi porsi alokasi DAU kabupaten/lainnya. Pemekaran daerah mempengaruhi alokasi DAU dengan menurunkan porsi alokasi kabupaten/kota lainnya karena jumlah penerima DAU bertambah sedangkan pagu DAU yang dialokasikan tetap. Walaupun DAU dialokasikan berdasarkan alokasi dasar dan celah fiskal masing-masing daerah, menurunnya kapasitas fiskal daerah induk dan tingginya celah fiskal DOB menggiring alokasi DAU yang cukup besar ke daerah tersebut.
2. Hasil uji F dan uji parsial t dalam analisis regresi data panel menunjukkan bahwa pemekaran daerah berpengaruh signifikan terhadap alokasi DAU. Rata-rata kenaikan alokasi DAU kabupaten/kota pada saat terjadi pemekaran daerah cenderung lebih rendah jika dibandingkan saat tidak ada alokasi untuk DOB. Kenaikan alokasi DAU untuk kabupaten/kota secara nasional juga teralokasikan cukup besar untuk DOB saat sudah dihitung mandiri. Besaran alokasi DAU untuk daerah induk dan DOB pada saat sudah menjadi beban nasional atau dihitung

mandiri meningkat drastis dan jauh lebih besar jika dibandingkan dengan rata-rata kenaikan alokasi kabupaten/kota lainnya. Dengan formula pengalokasian DAU saat ini, adanya pemekaran daerah membuka peluang *bureaucratic and political rent-seeking*, yakni kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari pemekaran wilayah, baik dana dari pemerintah pusat maupun dari penerimaan daerah itu sendiri. Selain itu, pemekaran daerah juga membuka peluang *opportunity loss* bagi daerah kabupaten/kota lainnya dalam hal pemanfaatan alokasi DAU bila melihat fakta dari banyak penelitian lainnya yang mengungkapkan bahwa belum adanya perbaikan kondisi ekonomi pada DOB jika dibandingkan dengan kondisi sebelum pemekaran, bahkan lima tahun setelah pemisahan

3. *Gini Coefficient* dan Kurva *Lorenz* yang digunakan untuk menguji tingkat pemerataan kemampuan keuangan antardaerah dalam rangka memenuhi kebutuhannya untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan serta menyediakan pelayanan publik bagi masyarakatnya menunjukkan hasil yang fluktuatif. Kenaikan tingkat pemerataan kemampuan keuangan daerah terjadi pada saat belum ada alokasi DAU untuk DOB yang telah dihitung mandiri. Penurunan tingkat pemerataan kemampuan keuangan daerah terjadi pada tahun di saat DAU juga teralokasikan untuk DOB yang telah dihitung mandiri. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa munculnya DOB menggerakkan pengalokasian DAU menjauhi tujuan pengalokasiannya untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah atau adanya pemekaran daerah akan mengambat pencapaian tujuan dari pengalokasian DAU.

## B. Saran

Dalam rangka mengoptimalkan peran serta pemerintah dalam meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah juga kualitas desentralisasi fiskal di Indonesia, berikut disampaikan beberapa hal untuk menjadi pertimbangan:

1. Perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan pengalokasian DAU terutama terkait dengan pengalokasian untuk Daerah Otonom Baru (DOB). Kebijakan pengalokasian DAU tersebut hendaknya dapat memperkecil peluang

*bureaucratic and political rent-seeking*, mencegah terjadinya masalah keagenan dalam proses pemekaran daerah, dan meningkatkan rasa keadilan untuk kabupaten/kota lainnya. Selain itu, kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkecil terjadinya penurunan tingkat pemerataan kemampuan keuangan antardaerah secara signifikan, mencegah penyerapan sebagian besar kenaikan pagu DAU untuk DOB, dan mengurangi peluang terjadinya *opportunity loss* pemanfaatan DAU bagi kabupaten/kota lainnya.

2. Untuk mengurangi munculnya *bureaucratic and political rent-seeking* dan masalah keagenan lainnya terkait pemekaran daerah, kegiatan monitoring dan evaluasi atas kebijakan pemekaran daerah dan kinerja DOB setelah pemekaran sangat perlu untuk dilakukan. Dengan ini, diharapkan pemekaran daerah dapat mencapai tujuannya untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Monitoring dimaksudkan untuk mengungkapkan seluruh informasi yang ada terkait layak atau tidaknya suatu daerah untuk dimekarkan atau DOB untuk dimunculkan. Sedangkan evaluasi dimaksudkan untuk melakukan pengukuran kinerja DOB terkait kemampuannya untuk menyejahterakan masyarakatnya atau mencapai tujuan pemekaran daerah. Penggabungan atau penghapusan daerah hendaknya bukan menjadi hal yang tabu ketika suatu DOB memang memiliki kinerja yang tidak baik atau tidak mencapai tujuan pemekaran bahkan setelah beberapa tahun setelah pemekaran.
3. Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis berharap penelitian ini dapat berlanjut dengan penelitian yang lebih komprehensif dan spesifik untuk memberikan alternatif kebijakan terkait pengalokasian DAU untuk daerah induk dan DOB. Dengan alternatif kebijakan tersebut diharapkan pengalokasian DAU terutama ketika munculnya alokasi untuk DOB dapat memberikan rasa keadilan kepada seluruh kabupaten/kota, memperkecil terjadinya masalah keagenan, memperkecil peluang pemanfaatan dana pemerintah, memperkecil peluang *opportunity lost* pemanfaatan DAU oleh seluruh kabupaten/kota, dan meningkatkan kualitas desentralisasi fiskal di Indonesia.